

RUNTUH SUSULAN PERPARAH KERUSAKAN JEMBATAN SOJOKERTO WONOSOBO, PERBAIKAN DITARGET SELESAI AWAL JUNI



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/PERBAIKAN-JEMBATAN-Kondisi-terkini-jembatan-Sojokerto-Wonosobo-yang-menghu.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Warga sekitar jembatan Sojokerto terpaksa memutar arah setelah jembatan penghubung vital antara Kecamatan Selomerto dan Leksono ditutup total akibat kerusakan yang semakin parah.

Kerusakan jembatan Sojokerto diperparah usai terjadinya runtuh susulan akibat hujan deras beberapa waktu lalu saat masih dalam proses tahapan perbaikan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Wonosobo, Nurudin Ardianto mengatakan perbaikan jembatan Sojokerto ditargetkan selesai pada awal Juni nanti.

"Target kami pengerjaan 2 bulan, waktu itu setelah Lebaran sekitar 1 April mulai pengerjaan maka perkiraannya di awal Juni kita sudah selesai," ucapnya saat diwawancarai tribunjateng.com, Kamis (15/5/2025).

Sebelumnya, jembatan Sojokerto dilaporkan warga setempat setelah adanya indikasi kerusakan retak pada selang waktu 10 hari menjelang Hari Raya Idulfitri lalu.

Usai mendapatkan laporan warga, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui DPUPR segera melakukan analisa kerusakan jembatan tersebut.

"Dari hasil analisa kita ternyata memang jembatan Sojokerto rusak karena usia," ungkapnya.

Dijelaskannya, jembatan Sojokerto dulunya dibangun dalam dua tahapan. Tahapan pembangunan abutmen jembatan pada sisi kanan dan kiri dilakukan pada tahun 1955. Sementara tahapan kedua yakni pembangunan badan jembatan dilakukan pada tahun 1990-an.

Kerusakan awal didapati terjadi pada area abutmen pada salah satu sisi jembatan yang mengalami keretakan akibat dimakan usia dan gerusan air sungai pada area pondasi jembatan.

"Di bawah jembatan itu mengalir Sungai Serayu kalau hujan itu aliran arusnya cukup deras," ungkapnya.

Akibatnya jembatan yang menjadi akses lalu lintas warga dari Kecamatan Selomerto menuju Kecamatan Leksono ataupun sebaliknya ditutup untuk keamanan.

Anggaran darurat senilai Rp 800 juta digelontorkan untuk perbaikan jembatan Sojokerto. Saat ini pengerjaan terus dikebut agar jembatan dapat dilalui kembali warga.

Kendala cuaca menjadi hambatan dalam proses penyelesaian perbaikan jembatan, namun dengan perencanaan yang telah dibuatnya diusahakan akan selesai tepat waktu.

"Kemarin-kemarin sempat hujan, banjir, dan batu-batu yang padahal sudah aman posisinya ikut hanyut. Mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu," harapnya.

Dengan ini masyarakat diimbau tidak melewati jembatan ini dan menggunakan jalur alternatif lainnya untuk sementara waktu hingga proses perbaikan selesai. (ima)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/05/15/runtuh-susulan-perparah-kerusakan-jembatan-sojokerto-wonosobo-perbaikan-ditarget-selesai-awal-juni>, "Runtuh Susulan Perparah Kerusakan Jembatan Sojokerto Wonosobo, Perbaikan Ditarget Selesai Awal Juni", tanggal 15 Mei 2025.
2. <https://www.wonosobozone.com/berita/46715126284/jembatan-sojokerto-kembali-runtuh-dpupr-targetkan-rampung-awal-juni>, "Jembatan Sojokerto Kembali Runtuh, DPUPR Targetkan Rampung Awal Juni", 10 Mei 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa warga sekitar jembatan Sojokerto terpaksa memutar arah setelah jembatan penghubung vital antara Kecamatan Selomerto dan Leksono ditutup total akibat kerusakan yang semakin parah. Anggaran darurat senilai Rp 800 juta digelontorkan untuk perbaikan jembatan Sojokerto. Saat ini pengerjaan terus dikebut agar jembatan dapat dilalui kembali warga.
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

- a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial;
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*